

Implementasi Kebijakan Joko Widodo Melalui Program KJS dan KJP (Ditinjau dari Perspektif Komunikasi Pembangunan)

Indah Suryawati

Pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Budi Luhur Jakarta

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Joko Widodo's policy of Kartu Jakarta Sehat (KJS) and Kartu Jakarta Pintar (KJP) programs. This research is to show the opinion from poor people of Jakarta related with KJS and KJP implementation based on the perspective of development communication. This research method is descriptive qualitative. Collection of primary data obtained through in depth interviews of the poor public in Jakarta related KJS and KJP programs. Meanwhile, collection of secondary data obtained through documentation of the various media and library research. The conclusion of this research explains Jokowi's poverty alleviation policies has not fully implementation.

Keywords: *implementation, policy, development communication*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi kebijakan Joko Widodo terkait pelaksanaan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan Joko Widodo melalui program KJS dan KJP ditinjau dari perspektif komunikasi pembangunan. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan observasi. Sedangkan data sekunder melalui penelusuran dokumen dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menjelaskan implementasi kebijakan program KJS dan KJP di tahun pertama masa kepemimpinan Jokowi belum sepenuhnya menyentuh masyarakat miskin dan rentan miskin di DKI Jakarta. Kendala utama implementasi tersebut adalah menyangkut kepemilikan KTP dan KK.

Kata kunci: *implementasi, kebijakan, komunikasi pembangunan*

Pendahuluan

Figur Joko Widodo selama dua tahun terakhir telah dicitrakan positif secara massif oleh media. Pencitraan itu dimulai saat *launching* mobil produksi lokal, mobil Esemka. Pencitraan positif terus mengalir hingga akhirnya menghantarkan Joko Widodo (Jokowi) menjadi Gubernur DKI Jakarta, meskipun harus mengalahkan pesaing terberatnya yang

notabene seorang *incumbent* asli Jakarta, Fauzi Bowo.

Gaya Jokowi yang antiformalitas, antigagah-gagahan pejabat dan antibasabasi yang tidak perlu (kecuali dalam norma kesantunan Jawa) dianggap sangat pas untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta. Ketika menjadi Wali Kota Solo misalnya, Jokowi lebih banyak turun ke lapangan dan menjadi *problem solver* bagi masyarakat Solo. Bahkan karena